

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

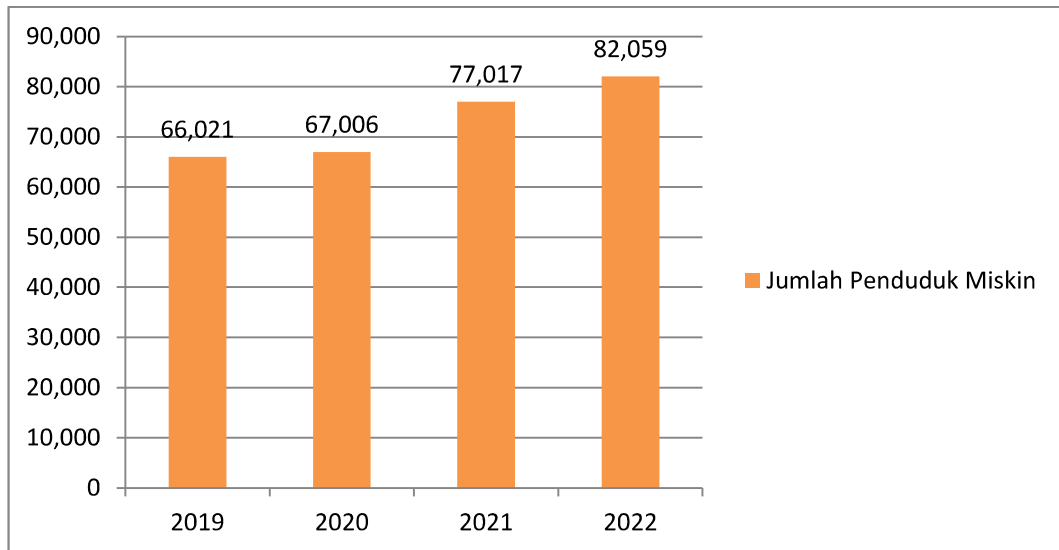
### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi yang memiliki 17 ribu pulau dan menjadi populasi terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2021 Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar yang dicapai sekitar 272 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 137 juta jiwa penduduk laki-laki. Dan untuk penduduk perempuan mencapai kurang lebih 135 juta jiwa, hal ini berdasarkan data administrasi kependudukan (Kemendagri, 2021). Dengan jumlah penduduk yang besar Indonesia memiliki letak geografis yang luas sehingga mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di setiap daerah (Rachmawati & Rahayu, 2020). Jika dilihat dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Maret 2021, Indonesia memiliki penduduk miskin dengan jumlah yang mencapai 27,54 juta jiwa. Hal tersebut tentunya merupakan angka yang cukup tinggi, ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor terjadinya kemiskinan tersebut. Kemiskinan bisa terjadi dikarenakan seperti tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, pendidikan yang rendah, dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan menjadi salah satu yang menyebabkan banyaknya pengamen, gelandangan, dan juga pengemis. Dikarenakan seseorang yang mengalami hidup dalam kemiskinan akan membuat seseorang menjadi tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, serta menjadi pengemis sebagai pekerjaan demi mendapatkan

uang. Sehingga pada akhirnya banyak penduduk kota yang hidup dalam kemiskinan melakukan berbagai cara demi mempertahankan hidupnya salah satunya dengan cara meminta belas kasih dari orang lain, salah satunya yang terjadi di Kota Batam.

Kemiskinan di Kota Batam merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Kota Batam, yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri terbesar di Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur dan perdagangan. Namun, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Kota Batam masih menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan. Banyak penduduk Kota Batam, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, masih mempunyai akses terbatas dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan (Wahyuniati & Abbas, 2019). Selain itu ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi masalah, dengan perbedaan antara pendapatan tertinggi dan terendah yang cukup mencolok. Masalah ini diperparah oleh para pendatang yang ingin mengadu nasib atau mencari pekerjaan di Kota Batam yang dilakukan dari orang-orang berbagai daerah yang sering kali menambah tekanan pada infrastruktur dan sumber daya kota.



**Gambar 1. 1.** Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batam 2019-2022

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam)

Dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Batam sangat tinggi. Dimana jumlah penduduk miskin di Kota Batam meningkat setiap tahunnya. Presentase penduduk miskin di Kota Batam pada Maret 2022 sebesar 5,19 persen, meningkat 0,14 persen jika dibandingkan pada Maret 2021. Dilihat pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Batam mengalami kenaikan mencapai 82,59 ribu orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 5,42 ribu orang jika dibandingkan pada Maret 2021 yaitu sebanyak 77,17 ribu orang. meskipun Kota Batam merupakan pusat ekonomi dan industri yang berkembang pesat, pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dalam mendistribusikan manfaatnya. Ketidaksetaraan ekonomi juga berperan dalam meningkatkan kemiskinan di Kota Batam. Perbedaan antara pendapatan yang tinggi dan rendah dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, dengan sebagian penduduk

yang mengalami ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok. Jumlah imigran yang tidak terampil juga menjadi masalah kemiskinan di Kota Batam, dimana hal tersebut juga menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya para pencari kerja yang datang dari luar Batam (Pramu & Hutajulu, 2023).

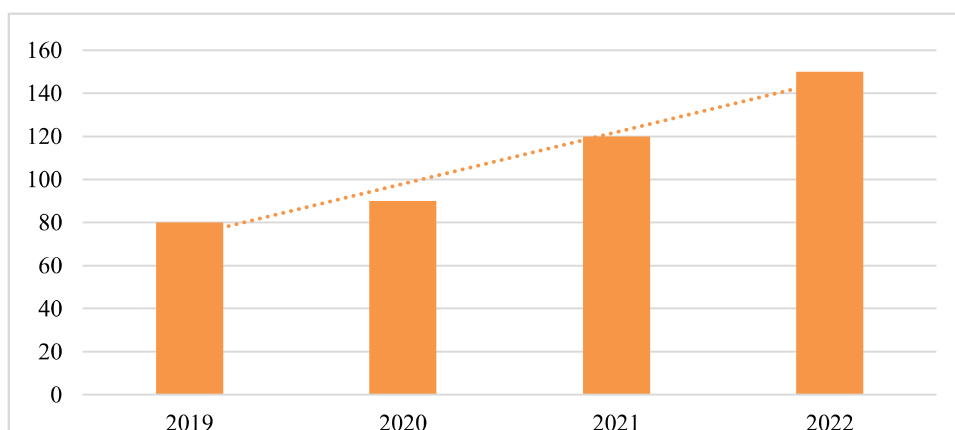
Kemiskinan di Kota Batam merupakan tanggung jawab dan tugas bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program perlindungan sosial yang membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, upaya bersama dapat diarahkan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Batam secara holistik, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh penduduknya.

Pengemis sering kali merupakan manifestasi yang nyata dari kemiskinan dalam masyarakat. Mereka adalah individu yang terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk mereka pecahkan. Hubungan antara pengemis dan kemiskinan terletak pada fakta dimana pengemis ialah orang yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, makanan, serta pekerjaan. Mereka menghadapi hambatan seperti

keterampilan, pendidikan yang rendah, atau masalah kesehatan yang menghambat mereka dalam mencari pekerjaan. Pengemis juga sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, sehingga membuat sulit terbebas dari kemiskinan. Maka dari itu penting untuk mengatasi masalah pengemis, penting dalam memahami akar kemiskinan yang mendasarinya serta dapat menyediakan solusi dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan serta memberikan dukungan sosial kepada mereka yang membutuhkan (Syahroni & Pambudi, 2019).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Pengemis ialah orang mencari uang dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan demi mengharap belas kasihan dari orang lain. Pada dasarnya pengemis dikategorikan menjadi dua. Pertama, mereka mengemis demi mempertahankan hidup dan yang kedua, mereka malas bekerja sehingga menjadi pengemis. Pada dasarnya pengemis tidak mempunyai identitas dikarenakan takut akan di kembalikan ke tempat asalnya. Pengemis juga menjadi salah satu permasalahan sosial di Kota Batam sehingga diperlukannya rehabilitas terhadap para pengemis. Rehabilitas adalah tindakan fisik, penyesuaian psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mencapai kehidupan yang maksimal sesuai dengan kemampuan (Rachmawati, 2020).

Pada umumnya pengemis ini sering melakukan berbagai cara dalam meminta-minta kepada orang lain seperti menjadi manusia silver, menjadi badut, untuk mendapatkan uang dengan cara mendapat belas kasihan dari orang lain yang berdampak bagi para penggu jalan lainnya (Tobing et al., 2024). Pengemis yang ada di kota Batam juga telah melanggar aturan dari pemerintah terkait kawasan bebas gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Maka dari itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari Pemko Batam memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Perumusan dibidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Sehingga permasalahan sosial yang terjadi di Kota Batam menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Sosial dalam menangani permasalahan sosial tersebut dan mencari solusinya.



**Gambar 1. 2.** Jumlah Pengemis di Kota Batam

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam)

Berdasarkan gambar diatas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, jumlah pengemis pada tahun 2019 berjumlah 80 orang. Pada tahun 2020 jumlah pengemis bertambah menjadi 90 orang, tahun 2021 bertambah menjadi 120 orang dan kemudian pada tahun 2023 bertambah lagi menjadi 150 orang. Hal ini berdasarkan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Untuk menekan angka tersebut Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan rehabilitasi sosial kepada pengemis yang berhasil terjaring razia. supaya bisa meninggalkan pekerjaan tersebut demi menjalankan kehidupan sosial yang lebih baik (Ayunda et al., 2020).

Pemerintah Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut melalui, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mana melaksanakan tugas urusan wajib di bidang sosial antaranya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan (Martika & Kartika, 2019). Rehabilitas sosial pengemis di kota Batam dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui unit pelaksanaan teknis bidang pusat pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau P2MKS yaitu UPT Nilam Suri. Dikarenakan UPT Nilam Suri menjadi tempat dalam merehabilitas sosial bagi yang mengalami permasalahan sosial seperti pengemis. UPT Nilam Suri juga merupakan bagian dari Dinas Sosial yang membantu

menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah pengemis di kota Batam, sehingga mereka dapat beradaptasi dalam pembangunan minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Terdapat beberapa program rehabilitas sosial di dalam Panti rehabilitas UPT Nilam Suri seperti di bidang memahat, salon, las tralis, serta menjahit. Para pengemis akan berada di sana selama 15-30 hari dalam mengikuti program pembinaan dan pembekalan tersebut (Hutauruk & Putri, 2021).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam bersama Tim TRC dan dibantu Satpol PP melakukan razia untuk menjangkau para pengemis yang meresahkan di beberapa titik lampu merah di Kota Batam. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam dan mendapatkan gelandangan dan pengemis menjadi yang paling banyak mereka temukan untuk diberikan pembinaan (batampos. 21 Maret 2024).

Banyak studi yang berurusan dengan Program Rehabilitas pengemis. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution dan Thamrin pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan, menunjukkan bahwa kebijakan program tersebut belum berjalan dengan efektif. Hasil tersebut dibuktikan dengan masih adanya kendala yang ada terkait program pembinaan dari Dinas Sosial seperti terbatasnya sumber dana dalam membangun rumah singgah atau panti sosial milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.



Selanjutnya penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Yudha, afjal dan Hayat pada tahun 2023 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandang dan Pengemis (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). Hasil penelitian masih terdapat faktor penghambat dan pendukung dari implementasi program tersebut, adapun faktor penghambatnya ialah belum adanya SOP razia dari pihak Dinas Sosial, sedangkan faktor pendukungnya ialah adanya sumber daya yang memadai dan memiliki sarana dan prasarana seperti rumah singgah atau panti.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memilih untuk melakukan penelitian terkait dengan program rehabilitasi sosial yang berfokus pada pengemis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada program rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki mental dari para pengemis. Untuk melihat lebih dalam lagi penelitian terkait dengan implementasi program rehabilitasi pengemis dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA BATAM”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka bisa diketahui bahwa setidaknya ada beberapa masalah terkait dengan permasalahan pengemis di Kota Batam, yaitu:

1. Terlepas dari adanya program rehabilitasi pengemis di Kota Batam, angka pengemis yang terus bertambah setiap tahunnya.

2. Adanya kecenderungan pengemis kembali ke jalan setelah program rehabilitas dilakukan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang disajikan maka batasan masalah difokuskan pada tingkat pengemis yang signifikan di Kota Batam,. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya melalui unit pelaksanaan teknis pada program rehabilitasi yang ada di Kota Batam.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan konteks yang dikemukakan diatas:

1. Bagaimana implementasi program rehabilitas pengemis di Kota Batam diterapkan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi program rehabilitas pengemis di Kota Batam?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program rehabilitas pengemis di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitas pengemis di Kota Batam.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri. peneliti membagi manfaat menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota industry seperti Kota Batam. Ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang dinamika kemiskinan dalam konteks perkotaan yang berkembang pesat. Penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman tentang program rehabilitas pengemis dikarenakan kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi dalam lingkungan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk memperbaiki program rehabilitasi yang ada atau mengembangkan program yang lebih efektif dalam membantu para pengemis dan gelandangan di Kota Batam. Temuan penelitian ini dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan situasi Kota Batam.